



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG**

LAPORAN

KINERJA

2025

LKjIP/ LAKIP

DPMPTSP KOTA BITUNG



KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati kami menyajikan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung Tahun 2025. Laporan ini menyajikan kinerja DPMPTSP Kota Bitung yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai, analisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bitung Tahun 2021-2026.

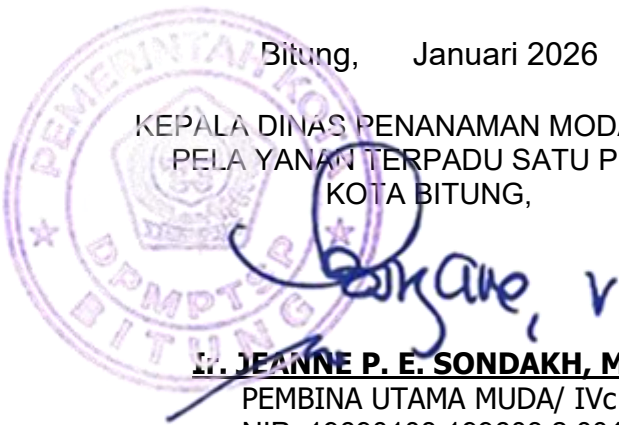
Pada Tahun 2025 kami melaporkan pengukuran kinerja atas 10 indikator kinerja yang dapat diukur kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan DPMPTSP Kota Bitung telah mencapai rata-rata 87% dari target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan target dalam Rencana Strategis. Ke depan, kami akan melakukan berbagai perbaikan untuk dapat mencapai kinerja yang baik.

Kami telah melakukan inovasi dan perbaikan dalam proses pelayanan perijinan agar pelayanan perijinan mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan . Kami akan melanjutkan inovasi dan perbaikan yang telah kami lakukan dalam rangka pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Bitung sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Kami akan terus memantau pencapaian kinerja DPMPTSP. Hanya dengan memantau pencapaian kinerja kami dapat mengetahui kemampuan kami dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dan meyakinkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang efektif dan efisien.

Bitung, Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG,


Dr. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP

PEMBINA UTAMA MUDA/ IVc
NIP. 19690108 199603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	9
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1. Rencana Stategis	10
2.2. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja	14
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.4. Penetapan Kinerja	16
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Pengukuran Kinerja.....	18
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	19
3.3. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB. IV PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kota Bitung terhadap Tujuan Tugas Pokok DPMPTSP.....	14
Tabel 2.2	Sasaran berdasarkan Misi dan Tujuan.....	15
Tabel 2.3	Sasaran berdasarkan Program.....	15
Tabel 2.4	Sasaran Strategi I - V.....	17
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025	18
Tabel 3.2	Jumlah Izin Penanaman Modal yang dikelola Tahun 2025	21
Tabel 3.3	Realisasi Investasi PMA per Sektor Tahun 2025	24
Tabel 3.4	Realisasi Investasi PMDN per Sektor Tahun 2025	25
Tabel 3.5	Produk Hukum DPMPTSP Tahun 2025	28
Tabel 3.6	Daftar Nama Perusahaan PMA Kota Bitung yang telah melaporkan LKPM	30
Tabel 3.7	Daftar Nama Perusahaan PMDN Kota Bitung yang telah melaporkan LKPM	31
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Program/ Kegiatan s.d 31 Desember Tahun 2025	33
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sub Kegiatan s.d 31 Desember Tahun 2025	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi DPM PTSP Kota Bitung	9
Gambar 2	Media Website DPM PTSP Kota Bitung	27
Gambar 3	Media FB DPM PTSP Kota Bitung	27

RINGKASAN EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP/ LAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bitung Tahun 2025 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Walikota Bitung dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPSTP Kota Bitung untuk meningkatkan kinerja. Laporan ini disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 tujuan dan 5 sasaran strategis, 10 indikator kinerja yang harus dicapai yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

No.	Tujuan	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran
1.	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	2	70 %
		Meningkatkan Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku	1	29 %
2.	Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi	Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi	3	216 %
		Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi	2	25 %
		Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	2	534 %

Dari hasil kinerja 5 (lima) sasaran di atas terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran, dengan rincian : sasaran I (pertama) dengan 2 indikator ditetapkan dengan nilai rata-rata 70%, sasaran II (kedua) dengan 1 indikator ditetapkan dengan nilai rata-rata 29%, sasaran III (ketiga) dengan 3 indikator ditetapkan dengan nilai rata-rata 216%, sasaran IV (keempat) dengan 2 indikator ditetapkan dengan nilai rata-rata 25%, dan sasaran V (kelima) dengan 2 indikator ditetapkan dengan nilai rata-rata 534%. Dari ke 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran tersebut diperoleh nilai rata-rata 87%.

Guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai Rencana Strategi DPMPSTP Kota Bitung, akan dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan, antara lain :

- Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan pelatihan penanganan pelayanan perizinan.
- Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal.
- Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.
- Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset, diantaranya dengan melakukan penyusunan/pengukuran kinerja dari mulai Esselon II sampai Esselon IV/ Jabatan Fungsional Tertentu dan dilanjutkan dengan pertanggung jawaban kinerja ke pelaksana dengan membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran Kinerja Program (SKP).



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-undang yang mengatur. menekankan bahwa pembangunan daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. kesempatan kerja. lapangan berusaha. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan. telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan. untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang. jangka menengah. dan tahunan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. mulai dari perencanaan. penganggaran dan pelaksanaan. pengawasan. evaluasi. oleh karena itu dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Akuntabilitas sangatlah penting dalam mencapai good governance. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintahan diwujudkan dalam penyusunan pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan kinerja dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan *good governance*. Kinerja dari pemerintah tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang lazim disebut LAKIP yang setiap tahunnya disusun oleh pemerintah untuk disampaikan kepada rakyat itu sendiri.

Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur dalam PERMENPAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang LAKIP. di mana dalam peraturan tersebut tertulis bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah Laporan Kinerja Tahunan yang berisi Pertanggungjawaban Kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung sebagai pembuat laporan kinerja berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi informasi capaian kinerja DPMPTSP yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

LAKIP DPMPTSP Kota Bitung berisi Ikhtisar Pencapaian Sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Perencanaan.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung sebagai salah satu lembaga teknis pemerintah daerah Kota Bitung yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bitung yang telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 dan berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung adalah sebagai berikut :

TUGAS

DPMPTSP Kota Bitung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

FUNGSI :

Fungsi DPMPTSP Kota Bitung :

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan penanaman modal dengan unit kerja terkait di lingkungan pemerintah daerah.
2. Penyusunan program penelitian dan pengkajian serta data, arsip dan dokumentasi di bidang penanaman modal.
3. Penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi di bidang penanaman modal;
4. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal serta menerima pengaduan dan advokasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan PTSP di daerah.
6. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dan PTSP di daerah.
7. Penyelenggaraan teknis administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Walikota secara rinci adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a) membantu Wali Kota di bidang tugasnya dalam memimpin satuan organisasi dan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi Dinas.

- b) menyiapkan dan menetapkan program kerja serta kebijakan umum maupun teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan petunjuk dan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- c) memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah;
- d) menyelenggarakan pengendalian pelayanan administrasi kepada seluruh staf dilingkungan Dinas;
- e) merekomendasikan pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;
- f) menyelenggarakan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dan organisasi lain di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g) memonitor dan evaluasi pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- h) memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di KEK;
- i) melakukan pengawasan dan pengendalian operasional KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha Pengelola KEK;
- j) menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan; dan
- k) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan Dinas dengan instansi/unit kerja lain yang terkait;
- b) pengoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c) melaksanakan pengendalian pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta rencana dan program;
- d) melaksanakan pemantauan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e) memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Wali Kota tentang langkah-langkah atau Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Sekretaris

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi penyusunan program. keuangan. rumah tangga. perlengkapan. kepegawaian dan pemberian pelayanan administrasi dilingkungan Dinas. membantu KEK sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretaris serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana yang dimaksud. Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a) pengoordinasian kegiatan dilingkungan Dinas;
 - b) pengoordinasian penyusunan rencana dan program penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c) memonitor perkembangan pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d) pengelolaan administrasi umum. perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - e) menyusun uraian tugas dan fungsi kelembagaan Dinas;
 - f) pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g) meneliti. mengkaji dan memproses pengadaan sanksi dan penghargaan kepegawaian;
 - h) pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - i) menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi dilingkungan Dinas; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas. meliputi :
 - a. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan verifikasi produk hukum pelaksanaan program kegiatan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Jangka Menengah dan Rencana Kerja Anggaran;
 - e. pelaksanaan pengelolaan pembukuan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran;
 - f. pelaksanaan pengelolaan keuangan. berupa penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran;
 - g. pelaksanaan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa;

C. Bidang Bidang Perencanaan. Pengembangan Potensi

1. Bidang Perencanaan. Pengembangan Potensi dan Investasi mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan perencanaan. pengembangan potensi dan investasi. membantu administrator KEK sesuai dengan tugas dan fungsi bidang serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan. Pengembangan Potensi dan Investasi. mempunyai fungsi meliputi :
 - a. memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan staf dilingkungannya;
 - b. menyusun perumusan kebijakan investasi dan melakukan koordinasi perencanaan investasi dan melakukan koordinasi perencanaan investasi serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam rencana terpadu secara komprehensif;
 - c. menganalisa dan mengkaji data penanaman modal. perizinan dan non perizinan;
 - d. menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi mengenai potensi dan investasi daerah;
 - e. menyelenggarakan penelitian dan pengkajian potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui investasi serta dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait;
 - f. menyusun perencanaan dan proyeksi pengembangan investasi;
 - g. menyusun peta potensi dan data investasi (rencana realisasi investasi);
 - h. berkoordinasi dengan Sekretaris dan bidang lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. Bidang Sistem Informasi dan Promosi

1. Bidang Sistem Informasi dan Promosi mempunyai tugas di bidang Sistem Informasi. Promosi. Layanan Publik. berkoordinasi dengan instansi terkait. lembaga sosial kemasyarakatan. menyajikan informasi Dinas. membantu administrator KEK sesuai dengan tugas dan fungsi bidang serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sistem Informasi dan Promosi. mempunyai fungsi meliputi :

- a. memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan staf dilingkungannya;
- b. menyelenggarakan urusan sistem informasi;
- c. menyajikan informasi sehubungan dengan promosi dan pelayanan publik Dinas;
- d. menyelenggarakan urusan promosi;
- e. menyelenggarakan urusan pelayanan publik;
- f. mengkoordinasikan pelayanan tugas;
- g. berkoordinasi dengan sekretaris dan bidang lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

E. Bidang Pelayanan Perizinan

1. Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal. membantu administrator KEK sesuai dengan tugas dan fungsi bidang serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sistem Informasi dan Promosi. mempunyai fungsi meliputi :
 - a. menyelenggarakan pengumpulan data. informasi. peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
 - b. menyusun pedoman teknis dan standar kebijakan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal;
 - c. menyelenggarakan perencanaan. pelaksanaan. pengendalian. evaluasi. pengarsipan dan pelaporan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
 - d. menyusun kerangka pelaksanaan pemecahan masalah berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal;
 - e. menyelenggarakan urusan administrasi. koordinasi dan penelitian lapangan. menetapkan SKRD serta pengarsipan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - f. menyelenggarakan analisis. pengembangan. pembinaan dan penilaian kinerja bidang penanaman modal;

- g. melaksanakan fungsi koordinasi dengan Sekretaris dinas dan bidang lainnya dalam rangka tugas-tugas kedinasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

F. Bidang Pengendalian

1. Bidang Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengendalian terhadap kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. penyusunan rancangan kebijakan Dinas. memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan permasalahan hukum. membantu administrator KEK serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian. mempunyai fungsi meliputi :
 - a. menyelenggarakan menyelenggarakan pengumpulan data. informasi. peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengendalian Dinas;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berada di Daerah;
 - c. melakukan penyusunan rancangan produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan pelayanan Dinas;
 - d. melakukan pemantauan penyusunan survey kepuasan masyarakat sehubungan dengan pelayanan Dinas;
 - e. mengkoordinir dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan bantuan hukum sehubungan dengan tugas pelayanan Dinas;
 - f. melakukan pemantauan hasil evaluasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
 - g. memfasilitasi/membantu proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan;
 - h. mengevaluasi dan melaporkan hasil konsultasi dan koordinasi bidang pengendalian dengan instansi terkait;
 - i. melakukan proses pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pegawai Dinas;
 - j. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Dinas;
 - k. berkoordinasi dengan sekretaris dan bidang lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi DPMPSTP Kota Bitung berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 29 Tahun 2022 terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris Dinas
- 3. Kepala Bidang
- 4. Kepala Sub Bagian / Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi DPMPSTP Kota Bitung sebagai berikut :





BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah DPMPTSP Kota Bitung yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh DPMPTSP Kota Bitung beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas.fungsi dan peran yang diamanahkan

Visi dan Misi

Visi :

Dalam mewujudkan pembangunan Kota Bitung kedepan. maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung sebagai Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal. mempunyai Visi yaitu :

**“Terwujudnya Bitung Kota Digital yang Mandiri,
Sejahtera dan Berkarakter berlandaskan Gotong royong”**

VISI/ merupakan suatu pandangan atau angan-angan kedepan tentang apa yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan dan sebagai Implementasi pelaksanaan tugas dari program dan kegiatan tersebut maka disusun juga MISI yang merupakan penerapan (Aplikasinya).

Dari Pengertian Visi tersebut diatas. maka dapat diuraikan sbb :

1. Digital: Saat ini kita berada di era digital. Sebuah periode yang ditandai oleh dominasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) internet. Sebagaimana telah dipahami bahwa digital adalah kata serapan dari bahasa asing yang dapat kita lihat asal katanya yaitu digit dan imbuhan al. Dengan imbuhan al menjadikan digital sebagai kata sifat yang bermakna bersifat digit. Kata digital sudah resmi menjadi bahasa Indonesia. Digital dapat berupa kata sifat atau kata benda. Sebagai kata sifat. digital berarti bilangan dan angka. sedangkan sebagai kata benda. digital berarti alat atau hasil produk. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Digital berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu;

berhubungan dengan penomoran. Pada perkembangannya kata digital merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. yaitu bagaimana bidang tersebut menggunakan teknologi digital baik dalam proses pengemasan informasi. transmisi data maupun penerimaannya. Sesuai dengan harapan Walikota dan Wakil Walikota Bitung bahwa dalam menjawab ketidakpastian. ketidakadilan dan diskriminasi. maka perlu digitalisasi daerah. Dalam artian bahwa dengan digitalisasi maka ketidakpastian. ketidakadilan dan diskriminasi dapat dihilangkan. Ketidakpastian. ketidakadilan. dan diskriminasi dimaksud disini adalah dalam hal proses pelayanan publik. Untuk itu maka pelayanan publik hendaknya dilakukan secara digital. Hal inilah yang dimaksudkan dengan digitalisasi. dengan maksud bahwa tentunya sistim pemerintahan harus berbasis elektronik (SPBE). Untuk mencapai tujuan SPBE atau e-Gov. maka pemerintah daerah harus membangun sistem kota cerdas (smart city). atau kota digital. Untuk mewujudkan konsep kota cerdas (smart city) dan/atau kota digital (digital city). pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai kebutuhan. mulai dari infrastruktur digital. sumber daya manusia. hingga sistem digital. Bagi Kota Bitung. dalam pemerintahan yang baru ini. penerapan SPBE atau e-Gov akan semakin dipacu agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak sekedar SPBE dan kota cerdas melainkan mencoba untuk melakukan lompatan dengan program kota digital yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan kota cerdas. Sebab. kota digital menuntut peran aktif semua pihak dan menuntut penggunaan aplikasi digital secara full dalam semua aspek kehidupan kota dan terutama pada layanan publik.

2. Mandiri: Dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan tantangan yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan. derajat kesehatan dan jiwa sosial yang baik. tingkat perekonomian yang baik. serta angka harapan hidup tinggi. Dimaknai juga sebagai kemudahan masyarakat untuk mengakses sumber – sumber kegiatan social ekonomi untuk kehidupan yang layak yang diukur melalui penyelenggaraan kehidupan masyarakat Kota Bitung yang sejajar dan sederajat. serta adanya kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan pokok serta kemampuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik.

3. Sejahtera: Dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Pengangguran. Penduduk Miskin. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). serta kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca pandemic Covid-19.
4. Berkarakter. Berkarakter berasal dari kata dasar karakter. Berkarakter memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berkarakter dapat menyatakan suatu tindakan. keberadaan. pengalaman. atau pengertian dinamis lainnya. Untuk itu berkarakter dalam pengeritan ini dimaknai sebagai kondisi masyarakat kota Bitung yang mempunyai ciri khas berkepribadian. berperilaku. bersifat. bertabiat. dan berwatak” yang akan selalu nampak dalam sikap dan perilaku keseharian. sebagai suatu ciri khas masyarakat kota Bitung.
5. Gotong Royong: Memiliki makna semangat gotong sebagai budaya masyarakat sulawesi utara yang saling tolong menolong. saling peduli terhadap yang lain. Semangat gotong royong inilah yang terus dipelihara sebagai salah satu modal dalam pembangunan.

Dari Pengertian VISI tersebut diatas. maka di buatlah MISI yang merupakan pelaksana tugas (*Action*) dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut.

Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan penyesuaian yang sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis

Adapun Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Bitung. adalah sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan Kota Bitung yang hidup rukun. harmonis. aman. nyaman dan damai dalam perbedaan.

Upaya yang terkandung dalam misi pertama ini adalah meningkatkan kerukunan dan toleransi kehidupan masyarakat yang ada di Kota Bitung yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan keberagaman serta kegotongroyongan sehingga kehidupan yang harmonis. aman. nyaman dan damai ditengah perbedaan tetap dapat terjaga dan di tingkatkan.

Misi 2: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berkualitas.

Upaya yang terkandung dalam misi kedua yaitu memfokuskan pada upaya peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia melalui variabel pembentuknya yang meliputi luasnya jangkauan akses pelayanan dasar bidang pendidikan. kesehatan dan layanan publik lainnya yang berkualitas.

Misi 3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang ramah investasi didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur sosial ekonomi yang berkualitas.

Upaya yang terkandung dalam misi ke tiga adalah memfokuskan pada peningkatan iklim usaha dan investasi melalui penerbitan regulasi yang mendukung kemudahan investasi. dan ketersediaan infrastruktur perkotaan pada kawasan-kawasan tertentu yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan daya tarik kota.

Misi 4: Menciptakan pemerintahan bersih. efektif. efisien dan hebat.

Difokuskan pada Pemerintahan yang dibentuk berlandaskan prinsip “Good Governance” dan “Clean Government” tercermin melalui kinerja aparatur pemerintah yang professional dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin variatif. serta meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah. Dalam mengimplementasikan Visi Misi dimaksud maka harus dibarengi nilai-nilai yang menjiwainya yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. sebab Visi. Misi dan nilai merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu nilai yang terkandung adalah “mempertahankan. integritas. menghormati perbedaan dalam masyarakat. mengejar keunggulan. mendorong kerja sama. menggalakan inovasi dan saling menghormati satu dengan yang lain”.

2.2. TUJUAN. SASARAN STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari Misi dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu antara 1 s/d 5 tahun serta menjadi arah perjalanan organisasi berdasarkan kriteria yang mudah dipahami oleh seluruh anggota organisasi.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kota Bitung terhadap tujuan Tugas Pokok DPMPSTP

Visi Kota Bitung	
“Terwujudnya Bitung Kota Digital yang Mandiri. Sejahtera dan Berkarakter berlandaskan Gotong royong”	
Misi :	
Misi Kota Bitung	Tugas DPMPSTP
1. Mewujudkan Kota Bitung yang hidup rukun. harmonis. aman. nyaman dan damai dalam perbedaan.	Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berkualitas.	
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang ramah investasi didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur sosial ekonomi yang berkualitas.	
4. Menciptakan pemerintahan bersih. efektif.efisien dan hebat.	

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam waktu tahunan. semesteran. triwulanan. atau bulanan.

Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan targetnya masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Tabel 2.2
Sasaran berdasarkan Misi dan Tujuan

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	
			URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berkualitas.	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Presentase Pelayanan yang sesuai SOP. dan Tepat Waktu. 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
			Meningkatkan Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku	1. Pesentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan Standart.
2.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang ramah investasi didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur sosial ekonomi yang berkualitas.	Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi.	Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi	1. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN). 2. Capaian Jumlah Realisasi Investasi. 3. Jumlah Potensi Ungulan Daerah.
			Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi	1. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi. 2. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik.
			Meningkatnya Pegawai dan Pengendalian Penanaman Modal	1. Produk-produk Hukum Kemudahan Berinvestasi. 2. Capaian peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DPMPSTSP Kota Bitung juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang. sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra DPMPSTSP Kota Bitung Tahun 2021-2026. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra DPMPSTSP Kota Bitung sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran berdasarkan Program

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Presentase Pelayanan yang sesuai SOP. dan Tepat Waktu. 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatkan Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku	1. Pesentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan Standart.
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi	1. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN). 2. Capaian Jumlah Realisasi Investasi. 3. Jumlah Potensi Ungulan Daerah.
4. Program Promosi Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi	1. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi. 2. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik.
6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Pegawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	1. Produk-produk Hukum Kemudahan Berinvestasi. 2. Capaian peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal.

2.4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas. transparansi. dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

DPMPPTSP Kota Bitung telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan. tugas. dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra DPMPPTSP Kota Bitung Tahun 2021-2026. Penetapan Kinerja DPMPPTSP Kota Bitung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sasaran Strategis I - V

Sasaran Strategis I	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	
Indikator Kinerja	Target/Rencana
a. Presentase Pelayanan yang sesuai SOP. dan Tepat Waktu	1900 Izin. 90%
b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai 86

Sasaran Strategis II	
Meningkatnya Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku	
Indikator Kinerja	Target/Rencana
a. Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart	1900 Izin . 90%

Sasaran Strategis III	
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi	
Indikator Kinerja	Target/Rencana
a. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)	PMA : 45 Proyek PMDN : 455 Proyek
b. Capaian Jumlah Realisasi Investasi.	PMA (Rp): 343.931.356.298.- PMDN (Rp): 48.632.866.981.-
c. Jumlah Potensi Unggulan Daerah	3 Sektor

Sasaran Strategis IV	
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi	
Indikator Kinerja	Target/Rencana
a. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi.	3 Event
b. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik	4 Bahan Promosi

Sasaran Strategis V	
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	
Indikator Kinerja	Target/Rencana
a. Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi.	3 Produk Hukum
b. Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal	PMA : 25 Perusahaan PMDN : 150 Perusahaan



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

DPMPSTP Kota Bitung melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja kegiatan maupun indikator kinerja sasaran utama yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPMPSTP Tahun 2025. Disamping itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap indikator kinerja kegiatan dan sasaran lainnya yang akan dicapai telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja DPMPSTP Kota Bitung Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja DPMPSTP Kota Bitung Tahun 2025 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja DPMPSTP Kota Bitung berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja DPMPSTP Tahun 2025

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Presentase Pelayanan yang sesuai SOP. dan Tepat Waktu	1900 Izin. 90%	548 Izin	28.84
b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai 86	Nilai 96.71	112
Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart	1900 Izin. 90%	548 Izin	28.84
Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)	PMA : 45 Proyek PMDN : 455 Proyek	PMA : 117 Proyek PMDN : 1177 Proyek	260 259
b. Capaian Jumlah Realisasi Investasi	PMA (Rp): 343.931.356.298.- PMDN (Rp): 48.632.866.981.-	PMA (Rp): 1.041.358.223.447.- PMDN (Rp): 133.717.811.291.-	303 275
c. Jumlah Potensi Unggulan Daerah	3 Sektor	3 Sektor	100

Sasaran Strategis IV			
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi.	3 Event	-	-
b. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik	4 Bahan Promosi	2 Bahan Promosi	50
Sasaran Strategis V			
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi.	3 Produk Hukum	30 Produk	1000
b. Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal	PMA : 25 Perusahaan	PMA : 17 Perusahaan.	68
	PMDN : 150 Perusahaan	PMDN : 101 Perusahaan	67

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Dari Sasaran Strategis yang pertama yaitu : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan* dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.2.1.1. Presentase Pelayanan yang sesuai SOP. dan Tepat Waktu	1.900 Izin	548 Izin	28.84

- a. Prosentase Pelayanan yang sesuai SOP dan tepat waktu.
- Penyelesaian berkas pada Tahun 2025 hasil realisasi yang di capai 548 Izin atau prosentase sebanyak 28.84% dari target 1900 Izin. yang terdiri dari 38 Jenis Izin meliputi :
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

:

66

Berkas

-

Bagian Perekonomian

:

-

Berkas

-

Dinas Perhubungan

:

122

Berkas

-

Dinas Perdagangan

:

23

Berkas

-

Dinas Pariwisata

:

-

Berkas

-

Dinas PU dan Kimpraswil

:

-

Berkas

-

Dinas Lingkungan Hidup

:

-

Berkas

-

Dinas Kesehatan

:

337

Berkas

-

Dinas Tenaga Kerja

:

-

Berkas

-

Dinas Pendidikan & Kebudayaan

:

-

Berkas

-

DPMPTSP

:

-

Berkas

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai 86	Nilai 96.71	112

b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Untuk mengetahui sejauh mana Pelayanan atau kinerja layanan yang diselenggarakan DPMPSTSP telah memuaskan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kota Bitung. maka dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pengukuran SKM dilakukan melalui pengisian kuesener yang terdiri dari 9 indikator unsur pelayanan. Nilai interval konfersi SKM berdasarkan patokan niai :

Nilai : 25 – 43.75	Kinerja Pelayanan :	Tidak Baik
Nilai : 43.76 – 62.50	Kinerja Pelayanan :	Kurang Baik
Nilai : 62.51 – 81.25	Kinerja Pelayanan :	Baik
Nilai : 81.26 – 100	Kinerja Pelayanan :	Sangat Baik

Telah dilakukan Survei kepada Masyarakat selaku Pemohon Izin melalui DPMPSTSP Kota Bitung mendapatkan prosentase sebesar 112 % dari yang ditargetkan. Jumlah responden sebanyak 322 responden diperoleh Nilai rata-rata SKM 96.71 dengan Nilai persepsi “4”. Mutu Pelayanan “A” kategori Sangat Baik. ini merupakan unsur pelayanan tertinggi pada unsur prilaku petugas dalam memberikan pelayanan.

4. Dari Sasaran Strategis yang kedua yaitu : *Meningkatnya kepemilikan izin sesuai standart yang berlaku.* dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart	1.900 Izin	548 Izin	28.84

4.1.1.1. Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart

Penyelesaian berkas Tahun 2025 DPMPSTSP Kota Bitung mengelola 38 Jenis Izin Sektoral. dengan jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 548 Izin dengan presentase yang telah terealisasi sebesar 28.84% dari yang direncanakan sebanyak 1.900 Izin. Pengurusan izin cenderung kepada Izin Persetujuan bangunan gedung. Tenaga Kesehatan Perawat. Izin Trayek. dan Izin Praktek Dokter Umum.

Tabel 3.2

Jumlah Izin Penanaman Modal yang dikelola Tahun 2025

No	NAMA SKPD		JENIS IZIN	JUMLAH	KET
1	2		3	4	5
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	
		2	Penambahan Bangunan Gedung	66	
		3	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	-	
2	Dinas Perdagangan	4	HO	-	
		5	ITPMB	23	
		6	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	
3	Dinas Perhubungan	7	Izin Trayek	122	
4	Dinas Kesehatan	8	Surat Izin Praktek Dokter Umum (SIP-DU)	47	
		9	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis (SIP-DS)	44	
		10	Surat Izin Praktek Dokter Gigi (SIP-DG)	12	
		11	Surat Izin Praktek Perawat (SIP-P)	128	
		12	Surat Izin Praktek Perawat Gigi	-	
		13	Surat Izin Praktek Apoteker (SIP-AP)	19	
		14	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK)	19	
		15	Surat Izin Apotek (SIA)	-	
		16	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	35	
		17	Surat Izin Klinik Kecantikan	-	
		18	Surat Izin Praktek Perawat GIGI (SIP-PG)	-	
		19	Surat Izin Toko Obat (SITO)	-	
		20	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D (IORS)	-	
		21	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	1	
		22	Surat Izin Praktik Analis	-	
		23	Surat Izin Klinik Utama	-	
		24	Surat Izin Penyelenggaraan Optik/Optik	-	
		25	Surat Izin Praktek Refraksionis Opticsien (SIRO)	1	
		26	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi	6	
		27	Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat	-	
		28	Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	-	
		29	Izin Praktik Dokter Internsip	-	
		30	Surat Izin Kerja Tenaga Penata Anastesis	-	
		31	Surat Izin Kerja Sanitarian	-	
		32	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratirium Medik	15	
		33	Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIK-SIPF)	3	
5	Dinas Tenaga Kerja	34	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	-	
		35	Dana Kompensasi Pembayaran TKA	-	
6	Dinas Lingkungan Hidup	36	Izin Lingkungan	-	
		37	Surat Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	-	
7	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	38	Izin Operasional SD	-	

5. Dari Sasaran Strategis yang ketiga yaitu : *Meningkatnya Jumlah Investasi dan Potensi Investasi.* dengan 3 (tiga) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)	PMA : 45 Proyek	PMA : 117 Proyek	260
	PMDN : 455 Proyek	PMDN : 1177 Proyek	259

a. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)

Tahun 2025 dengan jumlah penanaman modal untuk Modal Asing (PMA) adalah 303 Proyek dengan prosentase sebanyak 260% dan 1177 Proyek untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan prosentase sebanyak 259%.

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
b. Capaian Jumlah Realisasi Investasi.	PMA (Rp): 343.931.356.298.-	PMA (Rp): 1.041.358.223.447.-	303
	PMDN (Rp): 48.632.866.981.-	PMDN (Rp): 133.717.811.291.-	275

b. Capaian Jumlah Realisasi Investasi

Perusahaan PMA dari target rencana investasi senilai Rp. 327.553.672.665.- terealisasi sejumlah Rp. 1.041.358.223.447.- berarti sudah 303% dari yang direncanakan. Perusahaan PMDN dari target rencana investasi senilai Rp. 46.370.873.168.- terealisasi sejumlah Rp. 133.717.811.291.- berarti baru 275% dari yang direncanakan. Jumlah realisasi penanaman modal dalam negeri di Kota Bitung mengalami peningkatan secara signifikan.

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
c. Jumlah Potensi Unggulan Daerah	3 Sektor	3 Sektor	100

c. Jumlah Potensi Unggulan Daerah

Jumlah Potensi Unggulan Daerah yang terealisasi selalu memenuhi harapan target 100% sampai dengan Triwulan III. yang menjadi sasaran strategis dalam Meningkatkan Investasi dan potensi investasi yaitu terdiri dari 3 Sektor ; 1) Sektor Primer. 2) Sektor Sekunder (Industri). 3) Sektor Tersier (jasa).

1. Sektor Primer

Sektor Primer Kota Bitung yaitu; 1) Sektor Pertambangan dengan realisasi investasi PMDN sebesar 3 Proyek tambahan investasi sebesar Rp. 123.156.611.995.-. 2) Sektor perikanan dengan realisasi investasi PMDN sebesar 25 Proyek tambahan investasi sebesar Rp. 15.259.504.525.-.

2. Sektor Sekunder (Industri)

Sektor Sekunder (Industri) dengan realisasi investasi PMA yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu; 1) Sektor Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar 27 Proyek. tambahan investasi sebesar Rp. 67.744.526.751,-. 2) Sektor Industri Kimia dan Farmasi dengan realisasi investasi sebesar 3 Proyek. tambahan investasi sebesar Rp. 16.772.055.858.-.

Sektor Sekunder (Industri) dengan realisasi investasi PMDN yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu; 1) Sektor Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar 122 Proyek. tambahan investasi sebesar Rp. 324.217.697.149.-. 2) Sektor Industri Lainnya dengan realisasi investasi sebesar 18 Proyek. tambahan investasi sebesar Rp. 8.085.502.938.-.

3. Sektor Tersier (Jasa)

Sektor Tersier (Jasa) dengan realisasi investasi PMA yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu; 1) Sektor Transportasi, Gudang dan telekomunikasi dengan realisasi investasi sebesar 6 Proyek. tambahan investasi sebesar Rp. 118.239.475.000,-. 2) Sektor Hotel dan Restoran dengan realisasi investasi sebesar 3 Proyek. tambahan investasi sebesar Rp. 22.921.223.921,-.

Sektor Tersier (Jasa) dengan realisasi investasi PMDN yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu; 1) Sektor Perdagangan dan reparasi dengan realisasi investasi sebesar 120 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 76.581.214.910.-. 2) Hotel dan Restoran dengan realisasi investasi sebesar 20 Proyek. tambahan investasi sebesar Rp 20.994.183.199,-.

Tabel 3.3
Realisasi Investasi PMA per sektor Tahun 2025

No	Sektor	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp)
1	Hotel dan Restoran	3	22.921.223.921,00
2	Industri Karet dan Plastik	3	0
3	Industri Kimia dan Farmasi	3	16.772.055.858,00
4	Industri Lainnya	2	0
5	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan	1	1.789.774.595,00
6	Industri makanan	27	67.744.526.751,00
7	Listrik Gas dan Air	1	0
8	Perdagangan da Reparasi	4	20.000.000,00
9	Pertambangan	2	0
10	Transportasi, Gudang dan telekomunikasi	6	118.239.475.000,00
	JUMLAH	56	1.041.358.223.447,00

Tabel 3.4
Realisasi Investasi PMDN per sektor Tahun 2025

No	Sektor	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp)
1	Hotel dan Restoran	20	20.994.183.199,00
2	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain	2	0
3	Industri kimia dan farmasi	4	144.720.824.846,00
4	Industri lainnya	6	3.255.609.941,00
5	Industri Logam dasar, barang logambukan mesin dan peralatan	2	29.630.023.113,00
6	Industri makanan	122	324.217.697.149,00
7	Industri mineral dan logam	1	0
8	Industri lainnya	18	8.085.502.938,00
9	Konstruksi	13	2.723.816.220,00
10	Listrik gas dan air	6	147.734.870,00
11	Perdagangan dan Reparasi	120	76.581.214.910,00
12	Perikanan	25	15.259.504.525,00
13	Pertambangan	3	123.156.611.995,00
14	Perumahan kawasan industry dan perkantoran	2	2.176.020.000,00
15	Transportasi Gudang dan telekomunikasi	54	193.726.468.763,00
JUMLAH		351	133.717.811.291,00

4. Dari Sasaran Strategis yang keempat yaitu : *Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi* dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis IV			
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi.	2 Event	0 Event	0

a. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi

Tidak ada Event yang diikuti sebagai realisasi 0% dari Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi. Kegiatan Promosi selama Tahun 2025 tidak ada yang diikuti karena anggaran yang terbatas atau kurang yang disebabkan karena recofusing anggaran.

Sasaran Strategis IV			
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
b. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik	4 Bahan Promosi	2 Bahan Promosi	50

b. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik

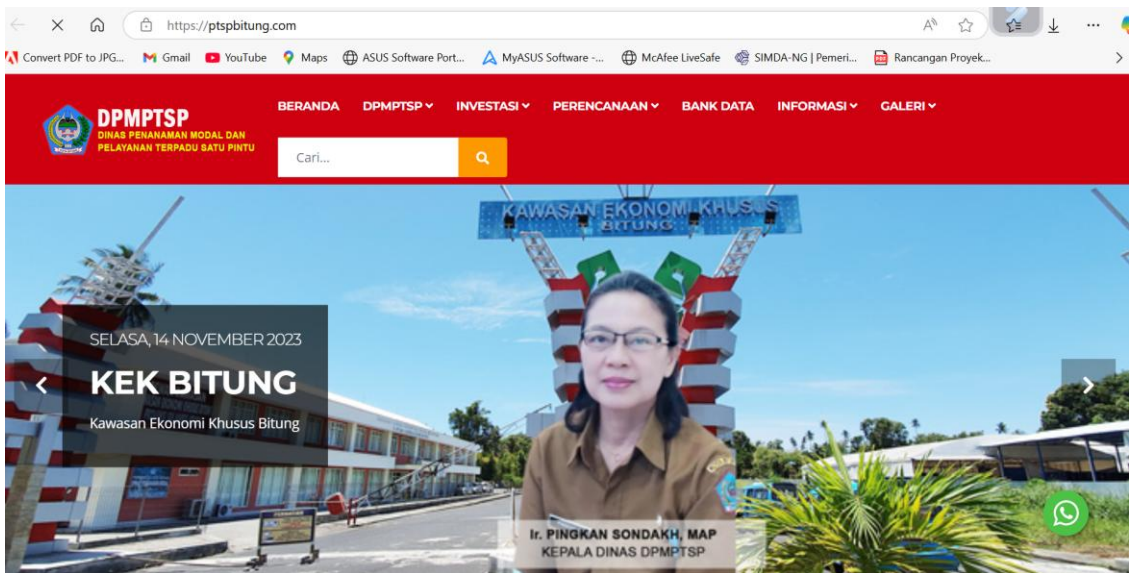
Jumlah Media Promosi dan informasi Cetak & Elektronik yang ditargetkan 4 Bahan Promosi. realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebanyak 2 Bahan Promosi yaitu Bahan Promosi Video Visualisasi dan Bahan Promosi Media Elektronik seperti Fun Page FB DPMPPTSP. sehingga mencapai **50%** dari yang ditargetkan karena kebutuhan akan Media promosi. Media Promosi dan Informasi Elektronik terdiri dari ;

- 1. Bahan Promosi Video Visualisasi.
- 2. Bahan Promosi Media Elektronik seperti Fun Page FB DPMPPTSP.

Semua Jenis Media Promosi dan informasi Elektronik dibuat dalam rangka mendukung kegiatan peningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi yang ada di Kota Bitung.

Gambar 2

Media Website DPMP TSP Kota Bitung sebagai berikut :



Gambar 3

Media FB DPMP TSP Kota Bitung sebagai berikut :



3. Dari Sasaran Strategis yang kelima yaitu : *Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal* dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis V			
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi.	3 Produk	30 Produk	1000

Produk-produk Hukum Kemudahan Berinvestasi

Produk Hukum baru maupun perubahan dibuat dalam rangka menyesuaikan dengan adanya;

1. Peraturan-peraturan yang lebih tinggi dalam mengatur kegiatan penanaman modal.
2. Dampak perubahan aturan-aturan serta perkembangan ekonomi yang mempengaruhi kemudahan berinvestasi.
3. Dampak dari perubahan Era Digital sehingga aktivitas-aktivitas pembuatan izin dalam penanaman modal beralih dari manual ke Online System. maka harus menyesuaikan dengan produk-produk hukum yang dibuat.

Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi yang direalisasikan selama Tahun 2025 yaitu;

Tabel 3.5

Produk Hukum DPMPSTP Tahun 2025

NO	PERIHAL	NOMOR SK	TANGGAL
1.	SK KADIS TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG PADA DPMPSTP KOTA BITUNG (Wawan Ibrahim)	570/SK-DPMPSTP/01/I/2025	06 JANUARI 2025
2.	SK KADIS TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMENT PENGADAAN BARANG DAN JASA PP-KOM PADA DPMPSTP KOTA BITUNG (Crist Madoll)	570/SK-DPMPSTP/02/I/2025	06 JANUARI 2025
3.	SK KADIS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DPMPSTP KOTA BITUNG	570/SK-DPMPSTP/03/I/2025	06 JANUARI 2025
4.	PENETAPAN STAF PENGELOLAH KEUANGAN PADA DPMPSTP KOTA BITUNG (YOSIA PODO, A.Md)	570/SK-DPMPSTP/04/I/2025	06 JANUARI 2025
5.	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DPMPSTP KOTA BITUNG (MARULAM. TH. TAMBUNAN, SE)	570/SK-DPMPSTP/05/I/2025	06 JANUARI 2025
6.	PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA PADA DPMPSTP KOTA BITUNG (Ibu Kadis)	570/SK-DPMPSTP/06/I/2025	06 JANUARI 2025
7.	PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DPMPSTP KOTA BITUNG (Sek Julius Talimbekas)	570/SK-DPMPSTP/07/I/2025	06 JANUARI 2025
8.	PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DPMPSTP KOTA BITUNG (Danny Roy Lumintang)	570/SK-DPMPSTP/08/I/2025	06 JANUARI 2025
9.	PENETAPAN USER PENGELOLAH KASDA ONLINE PADA DPMPSTP KOTA BITUNG (Ferli, Danny & Ibu Kadis)	570/SK-DPMPSTP/09/I/2025	06 JANUARI 2025
10.	PENETAPAN STAF PENGELOLAH KEUANGAN PADA DPMPSTP KOTA BITUNG (Christy Saelan)	570/SK-DPMPSTP/10/I/2025	06 JANUARI 2025
11.	PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN DAN KONSULTASI MASYARAKAT PADA DPMPSTP KOTA BITUNG	570/SK-DPMPSTP/11/I/2025	06 JANUARI 2025
12.	PENETAPAN STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN PADA DPMPSTP	570/SK-DPMPSTP/12/I/2025	06 JANUARI 2025
13.	PENETAPAN INDEX KEPUASAN MASYARAKAT PADA DPMPSTP KOTA BITUNG	570/SK-DPMPSTP/13/I/2025	06 JANUARI 2025
14.	PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA DPMPSTP KOTA BITUNG	570/SK-DPMPSTP/14/I/2025	06 JANUARI 2025
15.	PENETAPAN TIM PENGELOLAH SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA DPMPSTP KOTA BITUNG	570/SK-DPMPSTP/15/I/2025	06 JANUARI 2025
16.	PEMBENTUKAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI	570/SK-DPMPSTP/16/I/2025	15 JANUARI 2025
17.	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO PADA DPMPSTP KOTA BITUNG	570/SK-DPMPSTP/17/I/2025	15 JANUARI 2025
18.	PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BITUNG	570/SK-DPMPSTP/25/I/2025	28 APRIL 2025
19.	PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG	570/SK-DPMPSTP/26/VIII/2025	22 Agustus 2025
20.	PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN HASIL ANALISA JABATAN ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG	570/SK-DPMPSTP/27/VIII/2025	22 Agustus 2025

21.	PENETAPAN TIM PENGELOLAH SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA DPMTSP KOTA BITUNG	570/SK-DPMTSP/28/VIII/2025	22 Agustus 2025
-----	---	----------------------------	-----------------

SK SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2025

NO	PERIHAL	NOMOR SK	TANGGAL
1.	SK WALI KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF PT. FUTAI SULAWESI UTARA	188.45/HKM/SK/163/2025	21 AGUTUS 2025

SK SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2025

NO	PERIHAL	NOMOR SK	TANGGAL
1.	SK SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM NORTH SULAWESI INVESTMENT CHALLENGE KOTA BITUNG	188.45/HKM/KEP-SEK/5/2025	20 JUNI 2025

SK KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS KOTA BITUNG TAHUN 2025

NO	PERIHAL	NOMOR SK	TANGGAL
1.	SK KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPING PEMBANTUAN PROSES PERIZINAN BERUSAHA BAGI TENANT DI KEK KOTA BITUNG	570/SK-ADMKEK/01/VII/2025	10 JULI 2025

SURAT EDARAN WALI KOTA BITUNG 2025

NO	PERIHAL	NOMOR SK	TANGGAL
1.	SURAT EDARAN WALI KOTA BITUNG TENTANG LARANGAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI, DAN PUNGUTAN LIAR PADA LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	500.16.1/981/WK	19 SEPTEMBER 2025

KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG 2025

NO	PERIHAL	NOMOR SK	TANGGAL
1.	KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DPMTSP KOTA BITUNG.	188.45/HKM/SK/197/2025	01 OKTOBER 2025
2.	KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN PADA DPMTSP KOTA BITUNG.	188.45/HKM/SK/194/2025	01 OKTOBER 2025
3.	KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN PADA DPMTSP KOTA BITUNG.	188.45/HKM/SK/195/2025	01 OKTOBER 2025
4.	KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN EVALUASI TERHADAP KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA KEPALA DPMTSP KOTA BITUNG.	188.45/HKM/SK/196/2025	01 OKTOBER 2025
5.	KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG	188.45/HKM/SK/193/2025	01 OKTOBER 2025
	STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN /ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA INVESTOR DI DPMTSP KOTA BITUNG		

Untuk capaian realisasi Produk Hukum baru maupun perubahan yang dihasilkan sampai Tahun 2025 yaitu 30 Produk Hukum dari target 3 Produk Hukum. dengan capaian sebesar 1000%.

Sasaran Strategis V			
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
b. Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal	PMA : 25 Perusahaan	PMA : 17 Perusahaan.	68
	PMDN : 150 Perusahaan	PMDN : 101 Perusahaan	67

Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanaman modal.

Jumlah capaian pada Tahun 2025. peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal yang ditargetkan yaitu untuk PMA : 17 Perusahaan dari target 25 Perusahaan dengan Prosentase 68% dan PMDN : 101 Perusahaan dari target 150 Perusahaan dengan Prosentase 67%. Hasil prosentase capaian pada Tahun 2025 meningkat disebabkan karena;

- 1) Kesadaran para penanam modal atau investor untuk menginformasikan hasil kegiatan perusahaan mereka ke DPMPSTP.
- 2) Tindakanlanjut dari Pelaku Usaha dalam membuat pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Tabel 3.6

Daftar Nama Perusahaan PMA Kota Bitung yang telah melaporkan LKPM

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Negara	Nilai Investasi (Rp.)
1	PT. AGRO MAKMUR RAYA	Kota Bitung	Singapura	5.915.000.406
2	PT. ANPING SEAFOOD INDONESIA	Kota Bitung	R.R. Tiongkok	12.500.000
3	PT. BAKRI CONO	Kota Bitung	Inggris	1.590.000.000
4	PT. BUMI BERKAH BOGA	Kota Bitung		1.588.582.313
5	PT. DELTA PASIFIC INDOTUNA	Kota Bitung	Singapura	7.257.365.836
6	PT. FUTAI SULAWESI UTARA	Kota Bitung	R.R. Tiongkok	993.310.030.158
7	PT. HENGSTAT SAMUDRA BAHARI	Kota Bitung	R.R. Tiongkok	4.850.000.000
8	PT. INDO WORLD	Kota Bitung	Australia	3.308.002.083
9	PT. KIMIA FARMA APOTEK	Kota Bitung	Hongkong, RRT	37.269.227
10	PT. LEMBEH MARINA RESORT	Kota Bitung	Amerika Serikat	19.636.785.871
11	PT. MAPALUS MAKAWANUA CHARCOAL INDUSTRY	Kota Bitung	Kepulauan Virgin Inggris	3.891.005.288
12	PT. ODYSSEA UTAMA	Kota Bitung	Malaysia	2.046.626.834
13	PT. ORMAT GEOTHERMAL INDONESIA	Kota Bitung	Amerika Serikat	2.195.961.955
14	PT. PANTAI KASAWARI INDAH	Kota Bitung	Selandia Baru	623.735.452
15	PT. SOLITUDE RESORTS INDONESIA	Kota Bitung	Singapura	974.744.264
16	PT. TOKA TINDUNG GEOTHERMAL	Kota Bitung	Amerika Serikat	543.553.401
17	PT. UNITED CAN	Kota Bitung	Hongkong, RRT	1.310.409.907

Tabel 3.7**Daftar Nama Perusahaan PMDN Kota Bitung yang telah melaporkan LKPM**

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)
1	PT. ANUGRAH SEJATI BERSAMA	Kota Bitung	158.000.000
2	PT. ASDP INDONESIA FERRY CABANG MERAK (PELABUHAN MERAK)	Kota Bitung	593.392.887
3	PT. AGRO MAKMUR RAYA	Kota Bitung	408.850.000
4	PT. AKR CORPORINDO	Kota Bitung	1.600.000.000
5	PT. AKR TRANSPORTASI INDONESIA	Kota Bitung	25.917.071.100
6	PT. ARTA MINA JAYA	Kota Bitung	100.000
7	PT. ARTHA BINTANG SEAFOOD	Kota Bitung	200.000.000
8	PT. ASDP INDONESIA FERRY	Kota Bitung	293.959.635
9	PT. ASPIRASI HIDUP INDONESIA	Kota Bitung	3.461.058.029
10	PT. ADIGUNA BUMI PETROL	Kota Bitung	140.000.000
11	PT. BERDIKARI PONDASI PERKASA	Kota Bitung	60.000.000
12	PT. BGR LOGISTIK INDONESIA	Kota Bitung	6.175.073.932
13	PT. BUDI SENTOSA ABADI	Kota Bitung	1.081.000.000
14	PT. BENTENG LAUT SEJAHTERA	Kota Bitung	40.000.000
15	PT. BENTENG MAHA JAYA MANDIRI	Kota Bitung	214.689.898
16	PT. BENUA OMEGA SAMUDRA	Kota Bitung	17.500.000
17	PT. BERKAH MULIA MANDIRI	Kota Bitung	595.000.000
18	PT. BERKAT SAHABAT PERSADA	Kota Bitung	600.000.000
19	PT. BERLIAN INDAH	Kota Bitung	1.370.000.000
20	BGR LOGISTIK INDONESIA	Kota Bitung	2.275.338.375
21	BUDIJONO LIE	Kota Bitung	10.000.000
22	PT. BUN TUAN	Kota Bitung	3.000.000
23	PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA	Kota Bitung	10.508.316
24	PT. CIPTA NIAGA SEMESTA	Kota Bitung	15.839.000
25	PT. CITRA PORODISA EMPAT TUJUH	Kota Bitung	137.000.000
26	PT. CITRA SAMUDRA NUSANTARA	Kota Bitung	3.752.202
27	PT. CELEBES NUSANTARA BAHARI	Kota Bitung	550.000.000
28	PT. DAYA ADICIPTA WISESA	Kota Bitung	6.007.932.890
29	PT. DAYA INDAH ANUGERAH	Kota Bitung	3.776.922
30	PT. DAYA INDAH YASA	Kota Bitung	9.552.454
31	PT. DEHO CANNING COMPANY	Kota Bitung	100.794.000
32	PT. DWI MATRA SAKTI	Kota Bitung	8.000.000
33	PT. DWI SATYA SEJAHTERA	Kota Bitung	244.000.000
34	PT. DIVERS LODGE LEMBEH	Kota Bitung	27.855.110
35	PT. DINICHI VONA UTAMA	Kota Bitung	5.300.000.000
36	PT. EKSPRES SISTEM INDONESIA	Kota Bitung	20.382.783
37	PT. FAST FOOD INDONESIA	Kota Bitung	1.158.410.349
38	PT. FILIPI MANDIRI BERKARYA	Kota Bitung	720.000.000
39	PT. GADING CAKRA LOKA	Kota Bitung	539.347.522
40	PT. GEMBIRA GROSIR SEJAHTERAH	Kota Bitung	1.269.751.468
41	PT. GANIYYUN MULIA PERSADA	Kota Bitung	300.000.000
42	PT. GLOBAL JET EXPRESS	Kota Bitung	6.000.000
43	INDO MINA GRASIA	Kota Bitung	5.000.000
44	PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	Kota Bitung	130.838.504
45	PT. INDOMARCO ADI PRIMA	Kota Bitung	1.382.000
46	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Kota Bitung	654.503.267
47	PT. IMSYAH SATARI	Kota Bitung	50.000.000
48	PT. INDO LAUTAN MAS	Kota Bitung	500.000.000
49	PT. INDO MINA GRASIA	Kota Bitung	6.150.000
50	PT. INDO TEKNIK BITUNG	Kota Bitung	75.000.000
51	PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	Kota Bitung	712.171.961

No.	Nama Perusahaan		Alamat Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)
52	PT.	INDOMARCO PRISMATAMA	Kota Bitung	65.886.207
53	PT.	INSURINDO INTERSERVICES	Kota Bitung	489.938.072
54	PT.	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI MISA UTARA MAESAAN	Kota Bitung	355.000.000
55	PT.	JCO DONUT & COFFEE	Kota Bitung	107.000.000
56	PT.	JOHENLY INTI PERKASA	Kota Bitung	175.000.000
57	PT.	KARYA THENDERAN	Kota Bitung	50.000.000
58	PT.	KENCANA MEGAH LOGISTIK	Kota Bitung	101.174.700
59	PT.	KIRANA PERDANA MANDIRI	Kota Bitung	100.000.000
60	PT.	KUMALA MOTOR CEMERLANG	Kota Bitung	3.635.000
61	PT.	LAMBANG AZAS MULIA	Kota Bitung	173.102.000
62	PT.	MANADO RAGAM WISATA	Kota Bitung	86.000.000
63	PT.	MANADOMINA CITRATARUNA	Kota Bitung	452.172.000
64	PT.	MIDI UTAMA INDONESIA	Kota Bitung	952.423.337
65	PT.	MITRA JAYA SAMUDERA	Kota Bitung	1.411.844.959
66	PT.	MANDIRI BERTAHAN SEJAHTERA	Kota Bitung	1.020.000.001
67	PT.	MARINA NUSANTARA SELARAS	Kota Bitung	257.386.000
68	PT.	MEDIKA LOKA SULUTINDO	Kota Bitung	468.407.900
69	PT.	NUTRINDO FRESFOOD INTERNATIONAL	Kota Bitung	15.000.000.000
70	PT.	NIAGA INDOGUNA YASA	Kota Bitung	4.436.481
71	PT.	ORMAT GEOTHERMAL INDONESIA	Kota Bitung	13.644.740
72	PT.	PERTAMINA PATRA NIAGA	Kota Bitung	7.647.034.690
73	PT.	PUTERA BATAM BERSATU	Kota Bitung	2.050.000.000
74	PT.	PAHALA BAHARI NUSANTARA	Kota Bitung	6.703.452.544
75	PT.	PESTA PORA ABADI	Kota Bitung	36.980.000
76		PRIMA ERAJAYA BAHARI	Kota Bitung	1.823.417.300
77	PT.	PLN NUSANTARA POWER	Kota Bitung	2.226.660.683
78	PT.	RAHAYU PERDANA TRANS	Kota Bitung	400.000.000
79	PT.	SAMUDERA MANDIRI SENTOSA	Kota Bitung	18.173.997.554
80	PT.	SAMUDRA ULAM NUSANTARA	Kota Bitung	7.667.162.986
81	PT.	SINAR PURE FOODS INTERNATIONAL	Kota Bitung	5.262.853.000
82	PT.	SION TJITROSANTOSO	Kota Bitung	44.212.500
83	PT.	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Kota Bitung	58.822.000
84	PT.	SANBLASTING JAYA BERSAMA	Kota Bitung	341.000.000
85	PT.	SEMEN TONASA	Kota Bitung	137.447.568
86	PT.	SINAR BAHARI LAUTAN TIMUR INDONESIA	Kota Bitung	50.000.000
87	PT.	SINAR PURE FOODS INTERNATIONAL	Kota Bitung	15.854.404.236
88	PT.	SINERGI MAJU MAKMUR	Kota Bitung	50.000.000
89	PT.	SINGA RAJA	Kota Bitung	62.806.630
90	PT.	STEMAR JAYA	Kota Bitung	100.000.000
91	PT.	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Kota Bitung	30.395.426
92	PT.	SARI TUNA MAKMUR	Kota Bitung	100.000.000
93	PT.	SUMATERA CAHAYA MANDIRI	Kota Bitung	75.000.000
94	PT.	SARI COFFEE INDONESIA	Kota Bitung	5.409.645.304
95	PT.	SARIMELATI KENCANA	Kota Bitung	20.000.000
96	PT.	TONG BITUNG JAYA	Kota Bitung	14.477.400.000
97	PT.	TRIJAYA MAKMUR GEMILANG	Kota Bitung	651.319.457
98	PT.	TUHAN MEMBERKATI SEMUA	Kota Bitung	4.500.000.000
99	PT.	TOWER BERSAMA	Kota Bitung	1.801.316.220
100	PT.	UNGGUL SEJATI ABADI	Kota Bitung	4.000.000.000
101	PT.	YOEZHADASSAH	Kota Bitung	2.287.000.050

3.3.AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- I. Pagu Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.612.038.142.- (Enam Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah).
 - Belanja Tidak Langsung Rp. 6.213.536.392.-
 - Belanja Langsung Rp. 398.501.750.-
 - II. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 6.222.627.679.- (Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). yaitu 94 % dari pagu anggaran. dengan rincian :
 - Belanja Tidak Langsung Rp. 5.866.681.241.-
 - Belanja Langsung Rp. 355.946.438.-

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Program/ Kegiatan s.d 31 Desember Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.551.837.542	6.162.427.079	94
1.1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.720.000	1.720.000	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.230.405.392	5.883.550.241	94
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.500.000	31.500.000	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.084.000	35.082.837	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.866.000	1.866.000	100
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.852.150	136.308.162	76
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.410.000	72.399.839	100

2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	15.492.000	15.492.000	100
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	6.268.000	6.268.000	100
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	9.224.000	9.224.000	100
3	Program Promosi Penanaman Modal	10.133.000	10.133.000	100
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.133.000	10.133.000	100
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	19.213.000	19.213.000	100
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.213.000	19.213.000	100
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	13.622.600	13.622.600	100
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.622.600	13.622.600	100
6	Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1.740.000	1.740.000	100
6.1	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	1.740.000	1.740.000	100
J u m l a h		6.612.038.142	6.222.627.679	94

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sub Kegiatan

31 Desember Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	565.000	565.000	100

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	345.000	345.000	100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	810.000	810.000	100
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.213.536.392	5.866.681.241	94
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.189.000	13.189.000	100
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	565.000	565.000	100
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	650.000	650.000	100
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	740.000	740.000	100
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	725.000	725.000	100
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000	1.000.000	100
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31.500.000	31.500.000	100
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.510.000	2.510.000	100
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.999.337	100
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.750.000	4.749.500	100
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	4.000.000	100
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.824.000	18.824.000	100
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.866.000	1.866.000	100
18	Penyediaan Jasa Surat	10.000.000	9.906.500	99

	Menyurat			
19	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	136.000.150	119.288.012	88
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.220.000	1.220.000	100
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.632.000	5.893.650	19
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.410.000	72.399.839	100
23	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6.268.000	6.268.000	100
24	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1.614.000	1.614.000	100
25	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kab/ Kota	7.610.000	7.610.000	100
26	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1.730.000	1.730.000	100
27	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	8.403.000	8.403.000	100
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	9.723.000	9.723.000	100
29	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.470.000	4.470.000	100
30	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	3.520.000	3.520.000	100
31	Pemantauan. analisis. evaluasi. dan pelaporan di bidang perizinan	1.500.000	1.500.000	100

32	Pengawasan Penanaman Modal	13.622.600	13.622.600	100
33	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.740.000	1.740.000	100
Jumlah		6.612.038.142	6.222.627.679	94

Pagu Anggaran Belanja Langsung DPMPPTSP Tahun 2025 dengan target anggaran sebesar Rp. 398.501.750.- dan terealisasi sebesar Rp. 355.946.438.- dengan prosentase penggunaan anggaran keseluruhan dari Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebesar 89,32 %. Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung telah dapat menjalankan kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya. namun terdapat sejumlah hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan seperti :

- Adanya Pengurangan Anggaran / *Recofusing* yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak maksimal atau tidak bisa dilaksanakan.
- Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan kepada para pelaku usaha.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/ LAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Bitung Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun anggaran 2025. dan implementasinya disesuaikan dengan arahan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Renstra dan Renja DPMPSTSP Kota Bitung

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran DPMPSTSP Kota Bitung pada Tahun Anggaran 2025 secara umum telah tercapai. demikian pula mengenai verifikasi terhadap Indikator Output dan Outcome dari masing-masing Indikator Kinerja yang berhubungan dengan program dan kegiatan DPMPSTSP Kota Bitung

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian Indikator Sasaran sebanyak 10 Indikator dapat dikategorikan berhasil namun demikian masih perlu beberapa hal yang disarankan untuk dilakukan seperti :

1. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait. pelaku usaha.
2. Mengikut sertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan lainnya baik fungsional ataupun teknis untuk menambah pengetahuan dan keahlian Aparatur guna peningkatan produktivitas dan kompetensi pegawai DPMPSTSP Kota Bitung.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang ada pada DPMPSTSP Kota Bitung. berusaha memenuhi kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/ LAKIP) Tahun 2025. kiranya dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Bitung. Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG.

II. JEANNE P. E. SONDAKH. MAP
PEMBINA UTAMA MUDA/ IVc
NIP. 19690108 199603 2 001